

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Terdapat beragam definisi pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh para ahli ekonom. Salah satunya menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kombinasi antara penduduk di suatu negara dengan kemajuan teknologi yang ada di negara tersebut. Artinya, semakin banyak penduduk yang dimiliki oleh suatu negara, maka harus diiringi dengan semakin canggihnya teknologi untuk memenuhi kebutuhan penduduk dalam negeri tersebut (Erviana, 2020).

Secara umum, pembangunan ekonomi merupakan proses terjadinya peningkatan pendapatan riil per kapita penduduk dalam jangka waktu yang panjang di suatu negara yang diimbangi dengan penyempurnaan cara kerja kelembagaan. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pembangunan ekonomi harus memiliki hubungan satu sama lain sehingga dapat dilakukan analisis dengan cermat. Cara tersebut akan mempermudah dalam mengidentifikasi rangkaian peristiwa yang menyebabkan terjadinya kenaikan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Arsyad, 1999, dikutip dalam Salsabilah, 2012).

Pembangunan ekonomi bersifat multidimensional yang menuju suatu perubahan yang besar. Misalnya, perubahan struktur pada bidang ekonomi dan sosial, menurunkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan menekan tingkat pengangguran (Sirojuzilam, 2008, dikutip dalam Tumangkeng, 2018). Pembangunan ekonomi dikatakan efisien ketika terdapat keseimbangan antara perencanaan terkait pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Dengan adanya perencanaan pembangunan ekonomi, maka dapat terlihat secara keseluruhan bahwa suatu daerah didefinisikan sebagai unit ekonomi yang terdapat unsur berbagai interaksi antar satu dengan yang lainnya (Arsyad, 1999, dikutip dalam Tumangkeng, 2018).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi memiliki pengertian sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan terus menerus atau dinamis guna meningkatkan pendapatan per kapita yang diimbangi perbaikan pada sistem kelembagaannya. Upaya peningkatan ini diharapkan membawa dampak pada pendapatan riil masyarakat dalam waktu jangka panjang (Badri, 2015).

Tujuan inti pembangunan dibagi menjadi tiga. Pertama, memperbanyak persediaan dan distribusi bahan pokok kebutuhan sehari-hari seperti pelayanan dasar (kesehatan) dan lingkungan. Kedua, meningkatkan taraf hidup termasuk meningkatkan pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih berkualitas serta nilai budaya dan nilai kemanusiaan. Ketiga, memperbesar jangkauan pilihan dari segi ekonomi dan sosial untuk seluruh masyarakat nasional

melalui pembebasan dari perbudakan (Todaro, 2010, dikutip dalam Negara dan Putri, 2020).

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang mengakibatkan peningkatan pada pendapatan per kapita penduduk. Pendapatan per kapita didefinisikan sebagai hasil penggambaran dari dampak suatu perbaikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Proses pembangunan ekonomi daerah dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang dapat tercapai oleh daerah tersebut. Sederhananya, pembangunan nasional mendukung pembangunan daerah dan pembangunan daerah akan memperkuat pembangunan nasional (Nikijuluw, 2013).

Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan juga sebagai satu rangkaian aktivitas yang dilaksanakan secara kerja sama antara pemerintah setempat dengan masyarakat daerah dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang daerah miliki. Kemudian, nantinya diharapkan terbentuk suatu hubungan sebagai mitra antara pemerintah daerah dan pihak swasta guna menyediakan lapangan pekerjaan yang baru dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya, diperlukan partisipasi baik dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi sumber daya daerah untuk membentuk dan mendorong perekonomian suatu daerah (Arsyad, 1999, dikutip dalam Tumangkeng, 2018).

Pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai fungsi dari potensi sumber daya baik dari alam maupun dari manusia, tenaga kerja, investasi modal, sarana prasarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, sektor industri,

perdagangan antar daerah, serta pembiayaan untuk pembangunan, kelembagaan, dan lingkungan pembangunan secara keseluruhan (Adisasmita, 2005, dikutip dalam Nikijuluw, 2013). Sementara itu, pembangunan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh sumber daya yang daerah miliki dan permintaan terhadap komoditas yang berasal dari sumber daya alam. Sumber daya alam berperan sebagai aset jangka pendek untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Soegijoko dan Kusbiantoro, 1997, dikutip dalam Nikijuluw, 2013).

Kondisi antar daerah yang berbeda membawa dampak pada berbagai penerapan pembangunan. Pola kebijakan yang dimiliki suatu daerah belum tentu berhasil dan memberikan dampak yang sama apabila diterapkan pada daerah lainnya. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki kondisi, potensi, dan sumber daya yang tidak sama. Oleh karena itu, pola kebijakan yang akan diterapkan juga perlu disesuaikan (Bahri, 2018).

Pokok permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi daerah berada pada penerapan kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan kekhususan yang dimiliki daerah masing-masing dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik yang daerah miliki (Arsyad, 1999, dikutip dalam Salsabilah, 2012). Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa terdapat tiga pokok nilai yang harus mencakup dalam pembangunan daerah antara lain (Kuncoro, 2004, dikutip dalam Salsabilah, 2012):

- a. Ketahanan (*sustenance*), artinya kapabilitas daerah untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari;

- b. Harga diri (*self esteem*), artinya pembangunan daerah tetap harus memperlakukan manusia sebaik mungkin. Dalam hal ini, pembangunan suatu daerah harus meningkatkan kebanggaan masyarakat daerah setempat;
- c. *Freedom for servitude*, artinya tiap individu suatu negara memiliki kebebasan baik untuk berpikir, berkembang, berperilaku maupun melakukan usaha untuk ikut terlibat dalam pembangunan.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Definisi pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Profesor Simon Kuznets adalah kenaikan kapabilitas suatu negara dalam menyediakan berbagai barang-barang kebutuhan ekonomi kepada penduduk dalam waktu jangka panjang. Kapabilitas tersebut berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang digunakan. Dari definisi tersebut, maka didapatkan tiga unsur. Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terlihat dari peningkatan persediaan barang secara berkesinambungan. Kedua, kemajuan teknologi juga berperan dalam menekan tingkat pertumbuhan kapabilitas dalam penyediaan berbagai barang kebutuhan utama masyarakat. Ketiga, diperlukan penyesuaian penggunaan teknologi yang luas dan efisien agar inovasi yang ditemukan dapat bermanfaat secara tepat. (Jhingan, 1996, dikutip dalam Salsabilah, 2012).

Pertumbuhan ekonomi adalah deretan aktivitas perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat mengalami

kenaikan (Sukirno, 2010, dikutip dalam Negara dan Putri, 2020). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan Produk Domestik Bruto tanpa mempertimbangkan apakah besaran kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk atau tanpa mempertimbangkan apakah terdapat perubahan pada struktur ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian peningkatan output per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Output per kapita adalah total output dibagi jumlah penduduk. Dalam hal ini, proses tersebut memiliki penekanan karena terdapat unsur dinamis. Adapun dua sisi yang menjadi perhatian dalam pertumbuhan ekonomi yaitu sisi total output (GPD) dan sisi jumlah penduduk. (Budiono, 1985, dikutip dalam Salsabilah, 2012). Selain mengukur pertambahan PDB maupun PDRB, pertumbuhan ekonomi juga memberikan bobot immaterial dalam pengukurannya, seperti kepuasan, rasa aman, dan tenteram yang dirasakan oleh masyarakat (Kuncoro, 2004, dikutip dalam Salsabilah, 2012).

Adam Smith mengemukakan bahwa terdapat dua aspek utama dari proses pertumbuhan ekonomi. Kedua aspek tersebut adalah total pertumbuhan output dan total pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan output total terbagi menjadi tiga unsur pokok yakni sumber alam yang telah ada (tanah), sumber daya manusia (penduduk), dan persediaan kapital yang tersedia. Sedangkan, pertumbuhan penduduk bersifat pasif yang memiliki arti berapapun jumlah para pekerja yang dibutuhkan dalam proses produksi output akan tersedia (Negara & Putri, 2020).

Pendekatan pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibenarkan oleh Schumpeter. Schumpeter menganggap benar faktor kelembagaan, politik, dan

alam dan menggunakan asumsi bahwa suatu kelompok masyarakat akan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi tertentu. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Professor Schultz berpendapat apabila suatu negara ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, maka perlu melakukan tiga hal yaitu meningkatkan kuantitas barang yang diproduksi, melakukan perbaikan atas kualitas manusia, dan mendorong tingkat seni produksinya (Jhingan, 2016, dikutip dalam Negara & Putri, 2020).

2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai penambahan pendapatan tiap individu yang berada di wilayah tersebut. Artinya, seluruh nilai tambah di daerah tersebut mengalami peningkatan. Tolak ukur penambahan pendapatan adalah dalam nilai riil yakni diukur dengan harga konstan. Suatu daerah dikatakan makmur apabila memiliki nilai tambah yang dihasilkan di daerah tersebut dan seberapa sering *transfer payment* dilakukan. *Transfer payment* merupakan besaran pendapatan yang menuju ke luar daerah atau menerima aliran pendapatan dari luar daerah (Richardson, 1991, dikutip dalam Bahri, 2018).

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah kenaikan kapasitas ekonomi dari suatu subsistem spasial suatu daerah. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi daerah memiliki arti bahwa terjadi peningkatan kemakmuran suatu daerah. Pertumbuhan tersebut dapat terlihat dari kenaikan jumlah produksi suatu komoditas yang didapatkan suatu daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan yang pemerintah lakukan terutama di bidang perekonomian. Secara tidak langsung, pertumbuhan ekonomi

mencerminkan indikator dalam melakukan evaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2008, dikutip dalam Napitupulu, Kumenaung, & Niode, 2021).

Teori pertumbuhan ekonomi daerah mengkaji suatu daerah sebagai suatu sistem ekonomi yang terbuka dengan menghubungkan antar wilayah melalui arus pergeseran faktor produksi dan output produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tentunya akan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi daerah lainnya. Dalam hal ini, dampak tersebut berupa permintaan sektor tertentu kepada daerah lainnya yang secara otomatis akan memicu laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Terdapat perbedaan dalam menganalisis pertumbuhan perekonomian secara nasional dan daerah yaitu perpindahan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Arus perpindahan tenaga kerja dan modal yang begitu cepat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Suatu daerah dikatakan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat jika mempunyai keuntungan mutlak dari sumber daya alam. Hal tersebut berlaku bagi daerah yang lebih efisien dalam pelaksanaan kegiatan produksi (Sirojuzilam, 2008, dikutip dalam Bahri, 2018).

Adapun beberapa variabel yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah antara lain (Jhingan, 1996, dikutip dalam Salsabilah, 2012):

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal akan muncul apabila terdapat tabungan yang berasal dari pendapatan-pendapatan yang diinvestasikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan output di masa depan. Investasi yang biasanya digunakan adalah

investasi sektor produktif berupa pabrik, mesin dan peralatan yang dapat memperbanyak stok modal. Selain itu, terdapat investasi infrastruktur sosial dan ekonomi yang biasanya berupa jalan raya, listrik, air, sanitasi, dan komunikasi guna memudahkan aktivitas perekonomian.

2. Pertumbuhan Penduduk

Faktor positif selanjutnya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk sekaligus komponen yang berkaitan dengan peningkatan total angkatan kerja. Artinya, dengan total angkatan kerja yang semakin besar, maka semakin banyak faktor produksi tenaga kerja. Sementara itu, semakin banyak jumlah penduduk, maka potensi pasar domestik akan semakin bertambah.

3. Kemajuan Teknologi

Faktor paling utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu kemajuan teknologi. Artinya, terdapat perubahan dari cara yang lama menjadi cara yang baru. Terdapat tiga kategori dalam mengklasifikasikan kemajuan teknologi yakni netral, penghematan tenaga kerja, dan penghematan modal.

2.3 Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Sesuai amanat amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem otonomi daerah mulai diberlakukan. Amandemen tersebut mengatur permasalahan yang ada di lingkungan pemerintah daerah dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah, mulai dari tingkat provinsi, tingkat kota, hingga tingkat kabupaten, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Hal tersebut

dilakukan didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian, dipertegas dalam Pasal 18 ayat (5) dan (6) yang tertulis bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah pusat yang ditentukan oleh undang-undang dan berhak menetapkan peraturan daerah maupun peraturan lain dalam pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.

Secara spesifik, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, dilakukan revisi melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya perkembangan keadaan serta tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinilai sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Sementara itu, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai aspirasi masyarakat setempat.

Pada dasarnya, otonomi daerah diterapkan dengan harapan bahwa daerah memiliki kreativitas, pembaruan, dan kemandirian dalam melakukan pengelolaan

pembangunan di masing-masing daerah yang nantinya diharapkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat berkurang (Sun'an dan Senuk, 2015, dikutip dalam Christia dan Ispriyarso 2019). Fokus utamanya adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, baik pelayanan yang bersifat langsung maupun tidak langsung, semakin berkualitas. Artinya, penyediaan barang untuk publik dan pelayanan kepada publik semakin terjamin.

Konsekuensi selanjutnya adalah adanya pembagian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah, perencanaan perekonomian daerah serta program pembangunan daerah (Hadi dan Saragih, 2013, dikutip dalam Christia dan Ispriyarso, 2019). Dalam hal ini, penyelenggaraan otonomi daerah melimpahkan wewenang yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus keuangan daerahnya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat sekitar. Singkatnya, adanya otonomi daerah menyebabkan terjadinya desentralisasi.

Makna desentralisasi adalah peralihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah otonom dengan tujuan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik (Kaloh, 2002, dikutip dalam Christia dan Ispriyarso, 2019). Secara konsep, desentralisasi terbagi menjadi tiga yakni desentralisasi dalam bidang politik, desentralisasi dalam administrasi, dan desentralisasi fiskal (Khusaini, 2006, dalam Kurniawan 2012). Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari lingkungan tingkat pusat ke lingkungan tingkat yang lebih rendah agar mengatur dan mengurus daerahnya sendiri (Kumorotomo, 2008, dikutip dalam Christia dan Ispriyarso, 2019).

Desentralisasi fiskal menjadi akibat dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah terciptanya kemampuan keuangan antar daerah yang merata serta sepadan dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan ke pemerintah daerah. Hampir mirip dengan otonomi daerah, desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan potensi daerah dari segi fiskal. Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kesempatan yang cukup besar dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah masing-masing dan meningkatkan sumber daya yang dimiliki (Setiaji dan Adi, 2007, dikutip dalam Christia dan Ispriyarso, 2019). Kebijakan desentralisasi fiskal ini bertujuan meningkatkan perekonomian di daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Desentralisasi fiskal memiliki beberapa prinsip dan tujuan dalam penerapannya. Pertama, mengurangi ketimpangan dalam segi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Selain itu, meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan kepada publik di daerah-daerah dan menekan angka ketimpangan pelayanan kepada publik antar daerah. Tujuan selanjutnya adalah memanfaatkan sumber daya yang daerah miliki melalui pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel ke daerah yang tepat sasaran sehingga efisiensi dapat tercapai. Terakhir, mendorong kebijakan ekonomi makro, dalam hal ini kesinambungan fiskal (Mardiasmo, 2009, dalam Kurniawan 2012).

2.4 Teori Basis Ekonomi

Teori Basis Ekonomi menjadi salah satu teori yang sering digunakan untuk menjabarkan hal yang berkaitan dengan pertumbuhan daerah. Teori ini

menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah bergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam melakukan ekspor barang dan jasa. Singkatnya, sumber kekuatan utama pertumbuhan daerah berasal dari permintaan dari luar daerah terhadap barang dan jasa untuk dilakukan ekspor (Nikijuluw, 2013).

Teori basis ekonomi mulanya dikembangkan oleh Tiebout untuk pertama kali. Pada teori ini dilakukan analisis sektor basis dan sektor non-basis. Analisis tersebut mengelompokkan kegiatan produksi mana yang dapat menghasilkan suatu barang di dalam suatu daerah (Tiebout, 1956, dikutip dalam Putra, 2019). Selain itu, analisis ini dilakukan untuk melakukan identifikasi pendapatan dari sektor basis. Hal ini dikarenakan semakin banyak kegiatan basis yang dimiliki suatu daerah tentunya akan semakin meningkat penambahan pendapatan untuk daerah tersebut. Selanjutnya, permintaan suatu barang dan jasa akan semakin bertambah dan diharapkan dapat berpengaruh pada meningkatnya tingkat kegiatan non-basis (Richardson, 1991, dikutip dalam Putra, 2019).

Teori ini mengungkapkan apabila terdapat perubahan pada salah satu bagian aktivitas perekonomian, maka konsekuensinya adalah terjadi suatu perubahan yang lebih besar, baik pada produk domestik maupun aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Misalnya, terjadi kenaikan permintaan untuk barang ekspor. Secara otomatis, terdapat kenaikan penerimaan bagi tenaga kerja di industri ekspor yang kemudian juga akan berdampak pada kenaikan tingkat konsumsi para pekerja tersebut. Dampak lainnya adalah akan ada peningkatan

permintaan dari luar wilayah yang tentunya berpengaruh pada modal, tenaga kerja serta teknologi (Nikijuluw, 2013).

Melalui teori ini, semakin banyak ekspor yang dilakukan maka semakin membaik laju pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dikarenakan adanya pemanfaatan sumber daya daerah, tenaga kerja lokal, dan bahan baku yang dapat diekspor. Secara otomatis, penggunaan tersebut akan meningkatkan pendapatan daerah serta menyediakan lapangan pekerjaan yang baru. Asumsi tersebut digunakan apabila suatu daerah mempunyai sektor basis dan dapat bersaing dengan daerah yang lain pada sektor yang sama (Arsyad, 1999, dikutip dalam Putra, 2019).

Adapun teori ini mengklasifikasikan perekonomian daerah menjadi dua sektor yakni sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis diartikan sebagai sektor perekonomian yang dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan melakukan ekspor ke daerah lain. Sektor basis mempunyai peran utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini disebabkan semakin besar ekspor barang dari daerah tersebut maka semakin meningkat pertumbuhannya. Sementara itu, sektor non-basis diartikan sebagai sektor perekonomian yang hanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat daerahnya sendiri. Ruang lingkup produksi sektor non-basis beserta pemasarannya bersifat lokal. Artinya, hanya mampu mencukupi kebutuhan daerah tersebut sehingga tidak melakukan ekspor.

Kelemahan teori ini berada pada penentuannya yang bersumber pada permintaan eksternal, bukan permintaan internal. Hal tersebut menyebabkan teori ini sangat bergantung pada kekuatan yang dimiliki pasar baik secara nasional

maupun secara global. Disisi lain, teori ini dinilai sangat berguna dalam penentuan keseimbangan jenis industri yang satu dengan jenis industry yang lain serta sektor yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna menjaga stabilitas perekonomian (Salsabilah, 2012).

2.4.1 Sektor Basis

Sektor basis didefinisikan sebagai sektor ekonomi yang melayani permintaan pasar di daerah tertentu maupun pasar di luar daerah tersebut. Artinya, daerah mempunyai kapabilitas untuk melakukan ekspor barang dan jasa yang dihasilkan sektor tersebut ke luar daerah. Sektor basis menjadi penunjang perekonomian di daerah (Tarigan, 2005, dikutip dalam Atama, 2016). Selain itu, alasan sektor basis menjadi tumpuan utama perekonomian daerah adalah dapat menghasilkan penambahan pendapatan baik untuk daerahnya sendiri maupun untuk daerah lain.

Sektor basis ekonomi disebut juga sektor ekonomi unggulan. Suatu sektor tertentu dapat dikategorikan sebagai sektor ekonomi yang unggulan apabila sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang lebih besar daripada sektor lainnya dan berkontribusi lebih banyak daripada sektor lain. Dampak positif berikutnya adalah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri serta permintaan dari luar daerah. Oleh karena itu, sektor unggulan dapat diartikan sebagai sektor yang memiliki keunggulan baik komparatif dan kompetitif.

Pada dasarnya, sektor basis berkaitan dengan perbandingan, baik dalam skala internasional, nasional, maupun regional. Di lingkup internasional, sektor

tertentu dikategorikan unggul apabila mampu bersaing dengan sektor yang sama di negara lain. Sementara di lingkup nasional, suatu sektor dikatakan sektor unggulan jika mampu bersaing dengan sektor yang sama di wilayah lain, baik di pasar nasional maupun di pasar domestik (Subanti & Hakim, 2009).

Untuk mengetahui sektor basis di suatu wilayah tertentu, maka dapat menggunakan Analisis *Location Quotient* (LQ). Analisis LQ dapat mengetahui tingkatan spesialisasi suatu sektor basis melalui perbandingan antara peranan satu sektor tertentu di perekonomian daerah dengan peranan sektor yang sama di perekonomian secara nasional (Emilia, 2004, dikutip dalam Tumangkeng, 2018).

2.5 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Suatu sektor basis dapat dilihat dengan konsep yang sangat sederhana yakni melalui indikator kontribusi sektor tertentu dalam suatu PDRB negara. Artinya, indeks kontribusi mencerminkan seberapa besar kontribusi sektor tersebut secara keseluruhan terhadap perekonomian wilayah. Metode tersebut bernama analisis *Location Quotient* (LQ) yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan ekspor perekonomian suatu wilayah dan tingkat kemandirian sektor tertentu. Metode ini membandingkan kemampuan sektor tertentu di daerah yang diamati dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang satu tingkat lebih tinggi di atasnya (Nugraha, 2019).

Analisis LQ adalah metode yang membandingkan antara seberapa besar peranan suatu sektor atau suatu industri di suatu wilayah tertentu dengan peranan sektor yang sama di wilayah yang satu tingkat lebih luas. Misalnya, perbandingan

antara peranan sektor i di wilayah kabupaten dengan peranan sektor i di wilayah provinsi, maka provinsi dikatakan sebagai wilayah yang satu tingkat lebih luas, begitupun seterusnya. Analisis ini menjadi cara dasar untuk mengidentifikasi kemampuan sektor kegiatan tertentu yang dimiliki oleh suatu daerah. Hasil perhitungan analisis LQ berupa kesimpulan yang bersifat sementara sehingga perlu dilakukan kajian ulang melalui metode lain guna menyempurnakan dan membuktikan kebenarannya. Meskipun kesimpulan yang dihasilkan analisis LQ tidak bersifat final, tetapi sudah dapat memberikan gambaran seberapa kuat kemampuan suatu daerah dalam sektor-sektor yang dimiliki (Ardiansyah & Aseang, 2007).

Melalui analisis LQ, suatu sektor dapat terlihat apakah termasuk kegiatan basis atau kegiatan non-basis. Konsep dasar pemahaman dan penggunaan analisis LQ didasarkan pada teori ekonomi basis. Suatu industri diklasifikasikan sebagai sektor basis apabila sektor tersebut memiliki kemampuan menghasilkan output untuk memenuhi permintaan pasar di dalam daerah maupun di luar daerah. Hasil penjualan dari output sektor tersebut akan mendatangkan penerimaan untuk daerah. Hal ini tentunya berpengaruh pada penambahan konsumsi dan investasi. Secara otomatis, pendapatan yang daerah miliki dan lapangan kerja akan meningkat secara bertahap. Efek domino berikutnya adalah permintaan industri non-basis juga berpeluang bertambah. Peningkatan permintaan ini akan memancing investasi pada industri tersebut dan industri lainnya (Azizah, 2017).

Analisis LQ sering digunakan dalam menentukan sektor basis dikarenakan analisis LQ merupakan alat analisis yang mudah, cepat, dan sederhana dalam

penggunaannya. Umumnya, analisis LQ dijadikan sebagai analisis awal yang kemudian dilanjutkan menggunakan metode analisis yang lain. Dalam perhitungannya, analisis LQ turut mengikutsertakan nilai ekspor langsung maupun tidak langsung. Analisis LQ dapat mengetahui perubahan tingkat spesialisasi suatu sektor dari tahun ke tahun dikarenakan dalam perhitungannya menggunakan data historis untuk mengidentifikasi tren sektor tersebut. Selain itu, untuk menghasilkan analisis LQ perhitungannya tidak membutuhkan program yang rumit, cukup menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* (Jumiyanti, 2018).

Adapun terdapat kelemahan yang dimiliki analisis LQ dalam menentukan sektor basis di suatu wilayah. Misalnya, dasar perhitungan yang digunakan adalah satuan tenaga kerja. Beberapa asumsi digunakan walaupun dengan kenyataan di lapangan berbeda. Asumsi tersebut seperti kualitas tenaga kerja disamaratakan pada tiap jenis industri dan/atau setiap jenis industri memiliki produksi tunggal. Sementara itu, faktanya adalah kualitas tenaga kerja sangat bermacam-macam dan tiap jenis industri dapat memproduksi lebih dari satu jenis produk (Nyoman, dikutip dalam Ardiansyah & Aseseang, 2007). Selain itu, analisis ini menganggap bahwa suatu daerah sebagai wilayah yang tertutup. Asumsi selanjutnya yang diterapkan dalam analisis ini bahwa selera konsumsi masyarakat adalah homogen. Faktanya, hal tersebut berbanding terbalik antar daerah yang satu dengan daerah yang lain (Bappenas, 2003, dikutip dalam Ardiansyah & Aseseang, 2007).

Analisis LQ dibagi menjadi dua yaitu *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Analisis SLQ hanya menunjukkan hasil pada waktu tertentu yang telah ditemukan. Oleh karena itu, analisis DLQ hadir untuk

mengatasi kelemahan dari analisis SLQ tersebut. Sebagai penyempurna analisis SLQ, hasil perhitungan DLQ dapat memberikan gambaran perubahan suatu sektor tertentu (Nugraha, 2019).

2.5.1 Analisis *Static Location Quotient* (SLQ)

Analisis SLQ didefinisikan sebagai suatu metode permulaan dalam mengidentifikasi keunggulan sektor ekonomi di suatu daerah (Kuncoro, 2012, dikutip dalam Wibisono *et al.*, 2019). Metode ini membandingkan antara kapabilitas sektor tertentu di suatu daerah dengan kapabilitas sektor yang sama di daerah yang berada pada level satu tingkat di atasnya. Semakin besar hasil perhitungan SLQ artinya semakin besar daya saing sektor tersebut di tingkat lokal daripada sektor yang sama di tingkat regional. Adapun rumus SLQ sebagai berikut:

$$SLQ = \frac{\frac{q_i}{q_r}}{\frac{Q_i}{Q_n}}$$

Keterangan:

SLQ = Indeks/Koefisien SLQ

q_i = Jumlah produksi sektor i di tingkat lokal

q_r = Jumlah produksi total di tingkat lokal

Q_i = Jumlah produksi sektor i di tingkat regional

Q_n = Jumlah produksi total di tingkat regional

Berikut ini penjelasan dari hasil perhitungan SLQ:

- Hasil $SLQ > 1$ memiliki makna bahwa sektor tersebut termasuk sektor unggulan yang mempunyai peranan penting dalam melakukan ekspor.

Artinya, sektor tersebut lebih terspesialisasi dibandingkan sektor yang sama di tingkat regional sehingga mampu melayani kebutuhan pasar baik di dalam maupun di luar daerah. Oleh karena itu, sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor basis di tingkat lokal;

- Hasil $SLQ = 1$ memiliki makna bahwa suatu sektor di tingkat lokal memiliki peranan yang setara dengan peranan sektor tersebut di tingkat regional. Dalam hal ini, sektor yang bersangkutan memiliki tingkat spesialisasi yang sama dengan sektor sejenis di tingkat regional dan tidak melakukan ekspor sehingga hanya mampu melayani kebutuhan pasar di tingkat lokal;
- Hasil $SLQ < 1$ memiliki makna bahwa sektor tersebut bukan sektor unggulan dan tidak berperan dalam melakukan ekspor. Artinya, sektor tersebut kurang terspesialisasi dibandingkan sektor yang sama di tingkat regional sehingga belum mampu melayani kebutuhan pasar di daerahnya sendiri dan masih perlu bantuan pasokan dari daerah lain. Oleh karena itu, sektor tersebut termasuk sektor non-basis di tingkat lokal.

Namun, analisis SLQ bersifat statis. Hal ini menjadi kelemahan yang dimiliki analisis SLQ. Sifat statis tersebut hanya mampu menggambarkan peranan suatu sektor di satu waktu tertentu. Artinya, sektor yang unggul di tahun sebelumnya belum tentu menjadi sektor unggul di tahun berikutnya. Begitupun sebaliknya, sektor yang belum unggul di tahun sebelumnya bisa jadi akan menjadi sektor unggul di tahun berikutnya. Hal tersebut tergantung pada laju pertumbuhan tiap sektor di tingkat lokal dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama di

tingkat regional. Apabila laju pertumbuhan sektor *i* di tingkat lokal lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan sektor *i* di tingkat regional, meskipun saat ini menjadi sektor unggulan, maka tidak menutup kemungkinan akan kalah saing dengan daerah lain. Sebaliknya, apabila laju pertumbuhan sektor *i* di tingkat lokal lebih cepat daripada laju pertumbuhan sektor *i* di tingkat regional, sekalipun saat ini belum termasuk kategori sektor unggulan, maka memiliki peluang yang cukup besar di masa yang akan datang menjadi sektor unggulan. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka muncul analisis DLQ sebagai alternatif dan penyempurna analisis SLQ (Nazipawati, 2007).

2.5.2 Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Metode DLQ merupakan bentuk SLQ yang telah dimodifikasi. Analisis ini menunjukkan laju pertumbuhan sektor unggulan di suatu daerah. Artinya, perkembangan LQ dapat dilihat terjadi peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu (Tarigan, 2009, dikutip dalam Hidayat dan Supriharjo, 2014). Pada dasarnya, konsep perhitungan SLQ maupun DLQ tetap menggunakan kerangka berpikir yang sama, hanya saja menambahkan asumsi bahwa setiap nilai tambah dari suatu sektor tertentu memiliki rata-rata laju pertumbuhan tiap tahunnya masing-masing selama kurun waktu yang diamati (Ardiansyah & Aseseang, 2007).

Berikut rumus perhitungan DLQ:

$$DLQ = \left[\frac{(1 + g_j) / (1 + G_j)}{(1 + g_i) / (1 + G_i)} \right]^t$$

Keterangan:

DLQ = Indeks/Koefisien DLQ di sektor *i*

- g_j = Laju pertumbuhan sektor i di tingkat lokal
 G_j = Rata-rata laju pertumbuhan sektor di tingkat lokal
 g_i = Laju pertumbuhan sektor i di tingkat regional
 G_i = Rata-rata laju pertumbuhan sektor di tingkat regional
 t = Selisih tahun akhir dan tahun awal

Secara prinsip, penjelasan hasil perhitungan DLQ sama dengan hasil perhitungan SLQ, hanya saja DLQ lebih menekankan pada laju pertumbuhan.

Berikut ini interpretasi nilai DLQ:

- Jika hasil $DLQ > 1$, artinya laju pertumbuhan sektor i di tingkat lokal lebih cepat daripada laju pertumbuhan sektor yang sama di tingkat regional (prospektif) sehingga memiliki potensi untuk berkembang menjadi sektor basis di masa yang akan datang;
- Jika hasil $DLQ = 1$, artinya laju pertumbuhan sektor i di tingkat lokal sebanding dengan laju pertumbuhan sektor yang sama di tingkat regional;
- Jika hasil $DLQ < 1$, artinya laju pertumbuhan sektor i di tingkat lokal lebih lambat daripada perkembangan sektor i di regional (tidak prospektif) sehingga tidak memiliki potensi untuk berkembang di masa mendatang.

Langkah selanjutnya adalah hasil SLQ dan DLQ digabungkan dan digolongkan menjadi empat kategori (Kuncoro, 2012, dikutip dalam Wibisono *et al.*, 2019). Kategori tersebut adalah unggulan, andalan, prospektif, dan tertinggal.

- $SLQ > 1$ dan $DLQ > 1$ maka dikategorikan sebagai sektor unggulan. Artinya, sektor tersebut merupakan sektor basis di daerah yang diamati dan mempunyai laju pertumbuhan lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di daerah yang

satu tingkat lebih luas sehingga sektor tersebut tetap menjadi sektor basis baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;

- $SLQ > 1$ dan $DLQ < 1$ maka dikategorikan sebagai sektor prospektif. Artinya, sektor tersebut merupakan sektor basis di daerah yang diamati namun laju pertumbuhannya cenderung melambat bahkan tertekan dibandingkan sektor yang sama di daerah yang satu tingkat lebih luas sehingga sektor tersebut masih menjadi sektor basis saat ini namun memiliki peluang untuk berubah menjadi sektor non-basis di masa yang akan datang;
- $SLQ < 1$ dan $DLQ > 1$ maka dikategorikan sebagai sektor andalan. Artinya, sektor tersebut merupakan sektor non-basis di daerah yang diamati tetapi memiliki kecenderungan dapat berkembang karena memiliki laju pertumbuhan yang relatif lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama di daerah yang satu tingkat lebih luas sehingga sektor tersebut masih menjadi sektor non-basis saat ini namun berpotensi berubah menjadi sektor basis di masa yang akan datang;
- $SLQ < 1$ dan $DLQ < 1$ maka dikategorikan sebagai sektor tertinggal. Artinya, sektor tersebut merupakan sektor non-basis di daerah yang diamati dan mempunyai laju pertumbuhan yang melambat dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama di daerah yang satu tingkat lebih luas sehingga sektor tersebut tetap menjadi sektor non-basis baik saat ini maupun di masa yang akan datang.